

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa respon warganet yang ada di kolom komentar YouTube Narasi Newsroom edisi “KPK Riwayatmu Kini”, cenderung kontra terhadap TWK KPK dengan presentase 84,5%. Dominasi penolakan warganet mengindikasikan bahwa TWK KPK memang bermasalah, sehingga ditentang oleh sebagian besar warganet. Dari 84,5% respon kontra, sebanyak 41,5% menganggap TWK sebagai alat penyingkiran pegawai KPK tertentu. Warganet menganggap TWK sebagai dalih yang dijadikan alat atau senjata untuk menyingkirkan pegawai KPK yang jujur, berani, dan cerdas.

Menurut teori Neofungsionalisme masyarakat tidak selamanya bersifat harmoni, stabil, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan TWK yang sebelumnya diterima baik masyarakat yang memiliki tujuan kedepannya bangsa ini semakin terintegrasi, ternyata ketika diterapkan di KPK mengalami penolakan serta pertentangan. Kecenderungan respon kontra warganet terhadap TWK KPK di kolom komentar YouTube Narasi Newsroom wajar terjadi karena masyarakat tidak selalu bersifat harmoni. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat, maka berpotensi menimbulkan pertentangan, seperti halnya TWK KPK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK.

#### **B. Rekomendasi**

1. Penelitian tentang respon warganet terhadap TWK KPK menghasilkan kecenderungan respon kontra, artinya sebagian besar orang tidak setuju adanya TWK KPK. Hal ini berkaitan dengan proses pelaksanaan tertutup serta materi TWK dianggap bermasalah, seperti menyinggung SARA. Oleh karena itu, kepada pihak KPK supaya membenahi proses pelaksanaan hingga memastikan materi yang akan diberikan pada

peserta tes berhubungan dengan kompetensi KPK serta tidak melanggar HAM dan menyinggung SARA.

2. Penulis merokemendasikan pada lembaga KPK agar tetap melaksanakan TWK untuk uji wawasan kebangsaan pegawainya, namun dengan catatan perbaikan materi TWK dan penilaiannya lebih transparan.
3. Saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat baik itu melalui media sosial maupun secara langsung dapat dijadikan bahan evaluasi KPK serta BKN untuk mengadakan TWK berikutnya.
4. Media sosial sebagai ruang yang memberikan kebebasan beropini dapat terus dijadikan warganet sebagai alat untuk mengontrol KPK, dengan catatan tidak provokatif, tidak menebarkan ujaran kebencian, serta tidak menggunakan kata-kata yang melecehkan pihak yang berseberangan.

